

PENILAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE

Abdul Hamid¹, Agus Arman², Suhendra³, Nurmiati⁴, Bastian Lubis⁵

¹ DPRD Kabupaten Bone

abdulhamid.bone@gmail.com

² STIE Ciputra Makassar

agus.arman@ciputra.ac.id

^{3,4,5} Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha

hendra@patria-artha.ac.id³

nurmiati@patria-artha.ac.id⁴

lubis.bastian@patria-artha.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the financial performance of the Public Works and Spatial Planning Office of Bone Regency in 2018 - 2020. This study uses a value for money model which is a financial performance analysis tool for public sector organizations with ratios consisting of: economic ratios, efficiency ratio, and effectiveness ratio. The results showed that the Public Works and Spatial Planning Office in 2018-2020 based on the concept of value for money in general had shown good performance where the average economic ratio in 2018-2020 at the Bone District Public Works and Spatial Planning Service was 86, 61%, which means it is economical, then the average efficiency ratio is 90.90% which means it is efficient and the average effectiveness ratio shows a figure of 126.23% which means it is effective.

Keywords: Financial Performance, Economical, Efficient, Effective.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2020. Penelitian ini menggunakan model *value for money* yang merupakan alat Analisa kinerja keuangan untuk organisasi sektor publik dengan rasio-rasio yang terdiri dari: rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018-2020 berdasarkan konsep *value for money* pada umumnya sudah menunjukkan kinerja yang baik dimana rata-rata rasio ekonomi pada tahun 2018 -2020 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sebesar 86,61%, yang berarti sudah ekonomis selanjutnya rata-rata rasio efisiensi sebesar 90,90% yang berarti efisien dan rata-rata rasio efektifitas menunjukkan angka sebesar 126,23% yang berarti sudah efektif.

Kata kunci: Kinerja keuangan, Ekonomis, Efisien, Efektif.

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah nirlaba yang bertujuan untuk merupakan suatu bentuk organisasi meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat umum berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu kesehatan atau peningkatan mutu pendidikan dan lain-lainnya. Selain itu organisasi pemerintah juga merupakan organisasi yang orientasi atau sasarannya utamanya bukan untuk mencari keuntungan. Apabila dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik dari pada lembaga ekonomi (Halim, 2012). Akan tetapi, sebagaimana bentuk - bentuk kelembagaan lainnya, organisasi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi.

Untuk organisasi non laba nonpemerintah, sistem akuntansinya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disebut IAI. Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk

dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi input, output, outcome, impact, dan benefitnya (Mardiasmo, 2012).

Salah satu cara evaluasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran/penilaian suatu kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Menurut Mahmudi (2011) *Value for*

Money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomis, efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan bahwa inti pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone juga merupakan

entitas pemerintahan yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, khususnya di Kabupaten Bone. Berikut adalah anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018-2020:

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas PUPR Kabupaten Bone
Tahun 2018 – 2020

No	Uraian	Anggaran		
		2018	2019	2020
1	Pendapatan Asli Daerah	210,670,000	688,495,000	688,465,000
2	Pendapatan Lainnya	37,460,000	30,000,000	30,000,000
3	Jumlah Pendapatan	248,130,000	718,495,000	718,465,000
4	Belanja Operasi	29,329,463,972	27,183,457,248	16,598,710,000
5	Belanja Modal	117,814,837,180	129,925,912,488	103,505,174,600
6	Total Belanja	147,144,301,152	157,109,369,736	120,103,884,600
7	Surplus/Defisit	(146,896,171,152)	(156,390,874,736)	(119,385,419,600)

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 1. menunjukkan bahwa Kabupaten Bone masih jauh lebih kecil total pendapatan Dinas PUPR dibandingkan dengan total belanja

selama tahun 2018-2020. Hal ini penilaian kinerja menarik untuk diteliti terutama terkait

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Organisasi Sektor Publik

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Menurut Mahmudi (2010) organisasi pelayanan publik adalah suatu lembaga yang melaksanakan segala kegiatan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2010) dalam memberikan pelayanan kepada publik, instansi penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Tidak diskriminatif (kesamaan hak), Keseimbangan hak dan kewajiban,

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik merupakan wujud penilaian terhadap tingkat pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan entitas yang bersangkutan. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk memenuhi tiga maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2012):

- a. Pertama, digunakan untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah. Ukuran kinerja

dimaksudkan untuk membantu pemerintah agar berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang telah ditetapkan. Hal ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sebagai penyedia pelayanan publik.

- b. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- c. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memberikan wujud pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran atau penilaian kinerja sektor publik merupakan serangkaian proses pencatatan dan pengukuran pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, dan juga suatu proses. Untuk

mengetahui barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan dan kebijakan dari kegiatan-kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran dalam satu program perlu dilakukan penilaian kinerja baik dalam sektor privat maupun sektor publik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014).

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, bahwa komponen laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari yaitu: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Noerdiawan, dkk (2012), Akuntansi Pemerintah menghususkan dalam pencatatan dan

pelaporan transaksi- transaksi yang terjadi di Badan Pemerintah. Selanjutnya menurut Ratmono (2015), dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*).

Menurut Bastian (2017), keuntungan penerapan akuntansi berbasis akrual terdiri dari: a) Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, b) Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima, c) Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal

Value For Money

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (*intangibile output*).

Menurut (Mardiasmo 2012:133) langkah-langkah pengukuran value for money adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomi, hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan. Pertanyaan yang diajukan adalah:
 - a. Apakah biaya organisasi lebih

- besar dari yang dianggarkan?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
 - c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?
2. Pengukuran Efisiensi, diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah:
- a. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
 - b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
 - c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
 - d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.
3. Pengukuran Efektifitas, adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, Jalan Laksama Yos Sudarso, Watampone. Pengambilan data berupa laporan keuangan tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2020. Jenis penelitian ini

merupakan penelitian *deskriptif kuantitatif*.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja keuangan metode *Value for*

Money menurut Mahsun (2006) terdiri

$$= \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

dari:

Keterangan:

Jika < 100% = Efisien

Jika > 100% = Tidak Efisien

Jika = 100% = Efisien Berimbang

1. Rasio Ekonomi, dihitung dengan

cara:

$$= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektifitas, dihitung dengan

cara:

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika < 100% = Ekonomis

Jika > 100% = Tidak Ekonomis

Jika = 100% = Ekonomis Berimbang

Keterangan:

Jika > 100% = Efektif

Jika < 100% = Tidak Efektif

Jika = 100% = Efektif Berimbang

2. Rasio Efisiensi, dihitung dengan

cara:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan realisasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bone tahun 2018-2020, maka adapun hasil analisis rasio ekonomis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Rasio Ekonomi Dinas PUPR Kabupaten Bone
Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Ekonomi	Kesimpulan
1	2018	151.946.127.000	138.293.713.000	91,01%	Ekonomi
2	2019	157.109.368.000	138.293.713.000	88,02%	Ekonomi
3	2020	125.078.775.000	101.039.923.000	80,78%	Ekonomi
Rata-Rata				86,61%	Ekonomi

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa rasio ekonomi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone secara rata-rata selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 sebesar 86,61% atau berada pada kategori ekonomi dimana pada tahun 2018 adalah sebesar 91,01% yang diperoleh dari perhitungan perbandingan antara realisasi belanja sebesar Rp138.293.713,- dengan anggaran belanja yang tersedia sebesar Rp151.946.127,-. Berdasarkan rumus ekonomi menurut value for money, maka angka sebesar 91,01% lebih kecil daripada 100%, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 berada pada kategori ekonomis. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2019 memiliki rasio ekonomi sebesar 88,02% atau berada pada kategori ekonomis, jika dibandingkan dengan tahun 2018 maka tahun 2019 lebih ekonomis. Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone memiliki nilai rasio ekonomi sebesar 80,78%, atau berada pada kategori ekonomis, bahkan tahun 2020 paling ekonomis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone selama tahun 2018-2020 berada pada kategori ekonomis hal ini berarti realisasi anggaran lebih kecil daripada anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa kisaran nilai ekonomis selama tiga tahun terakhir yaitu 2018-2020 antara 80,78% hingga 91,01% hal ini berarti sudah ekonomis. Hal ini memberikan indikasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang pada tahun 2018-2020 sudah mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu atau mampu menghemat anggaran yang

tersedia secara rata-rata sebesar 13,39% atau sekitar Rp18.835.640.000,-

Adapun hasil analisis rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Rasio Efisiensi Dinas PUPR Kabupaten Bone
Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Anggaran Operasional	Realisasi Operasional	Rasio Efisiensi	Kesimpulan
1	2018	31.245.190.000	29.329.463.000	93,87%	Efisien
2	2019	27.183.457.000	24.088.399.000	88,61%	Efisien
3	2020	16.598.710.000	14.976.860.000	90,23%	Efisien
Rata-Rata				90,90%	Efisien

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone secara rata-rata selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 sebesar 90,90% atau berada pada kategori efisien dimana pada tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 93,87% yang lebih kecil daripada 100% sehingga dapat dikategorikan efisien. Hasil tersebut diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi operasional pada tahun 2018 sebesar

Rp29.329.463,- dengan anggaran operasional sebesar Rp31.245.190,-. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2019 memiliki nilai rasio efisiensi sebesar 88,61% atau mengalami perbaikan dengan kategori efisien sesuai standar. Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone memiliki rasio efisiensi sebesar 90,23% atau berada pada kategori efisien sesuai standar. Jika dibandingkan antara tahun 2018

dan tahun 2019 maka rasio efisiensi yang paling rendah pada Dinas PUPR Kabupaten Bone adalah pada tahun 2019. Dikatakan efisien karena realisasi lebih kecil daripada anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa kisaran nilai efisiensi selama tiga tahun terakhir yaitu 2018-2020 antara 88,61% hingga

93,87% hal ini berarti sudah efisien. Hal ini memberikan indikasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018-2020 sudah mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu atau mampu menghemat anggaran yang tersedia secara rata-rata sebesar 9,10% atau sekitar Rp2.210.878.000,-

Adapun hasil analisis rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Rasio Efektivitas Dinas PUPR Kabupaten Bone
Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	Kesimpulan
1	2018	688.480.000	872.600.400	126,74%	Efektif
2	2019	688.495.000	822.592.900	119,48%	Efektif
3	2020	688.465.000	912.100.000	132,48%	Efektif
Rata-Rata				126,23%	Efektif

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa rasio efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone secara rata-rata selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 sebesar 126,23% atau berada pada

kategori efektif dimana pada tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 126,74% yang lebih besar daripada 100% sehingga dapat dikategorikan efektif. Hasil tersebut diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi

anggaran PAD pada tahun 2018 sebesar Rp872.800.600,- dengan anggaran PAD sebesar Rp688.480.000,-. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone pada tahun 2019 memiliki nilai rasio efektivitas sebesar 119,48% atau mengalami penurunan dengan kategori efektif sesuai standar. Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone memiliki rasio efektivitas sebesar 132,48% atau berada pada kategori efektif sesuai standar. Jika dibandingkan antara tahun 2018 dan tahun 2019 maka rasio efektivitas yang paling tinggi pada Dinas PUPR Kabupaten Bone adalah pada tahun 2020. Dikatakan efektif karena realisasi

lebih besar daripada anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa kisaran nilai efektivitas selama tiga tahun terakhir yaitu 2018-2020 antara 119,48% hingga 132,48% hal ini berarti sudah efektif. Hal ini memberikan indikasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018-2020 sudah mampu melewati target anggaran PAD yang telah ditetapkan yang secara rata-rata sebesar 26.23% atau sekitar Rp180.617.767,-

KESIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018-2020 berdasarkan konsep *value for money* pada umumnya sudah menunjukkan kinerja yang baik ditinjau dari segi

ekonomis mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu atau mampu menghemat anggaran yang tersedia secara rata-rata sebesar 13,39% atau sekitar Rp18.835.640.000,-

per tahun kemudian dari sisi efisiensi mampu menghemat anggaran yang tersedia secara rata-rata sebesar 9,10% atau sekitar Rp2.210.878.000,- per tahun serta dari sisi efektivitas mampu

melewati target anggaran PAD yang telah ditetapkan yang secara rata-rata sebesar 26.23% atau sekitar Rp180.617.767,- per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2017. *Akuntansi Managemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim Abdul. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Noerdiawan Deddy, Putra Sondi Iswahyudi, Rahmawati Maulidah, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratmono Dwi, dan Sholihin. Mahfud. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik